

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengangguran

2.1.1.1 Pengertian Pengangguran

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja namun tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari kerja (Sumarsono, 2009:259). Senada dengan pendapat tersebut, Mankiw (2006:154) mendefinisikan pengangguran sebagai masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, Kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat di simpulkan bahwa pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, orang yang sedang mencari kerja, maupun orang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.

Menurut Kaufman dan Hotckiss (1999:657-668) pengangguran akan muncul dalam suatu perekonomian disebabkan oleh tiga hal; proses mencari kerja, kekakuan upah, dan efisiensi terhadap upah.

1. Proses Mencari Kerja

Pada proses ini disediakan penjelasan teoritis yang penting bagi tingkat pengangguran. Munculnya angkatan kerja baru akan

menimbulkan persaingan yang ketat pada proses mencari kerja. Dalam proses ini terdapat hambatan dalam mencari kerja yaitu disebabkan adanya para pekerja yang ingin pindah ke pekerjaan lain, tidak sempurnanya informasi yang diterima pencari kerja mengenai lapangan pekerjaan yang tersedia, serta informasi yang tidak sempurna pada besarnya tingkat upah yang mereka terima.

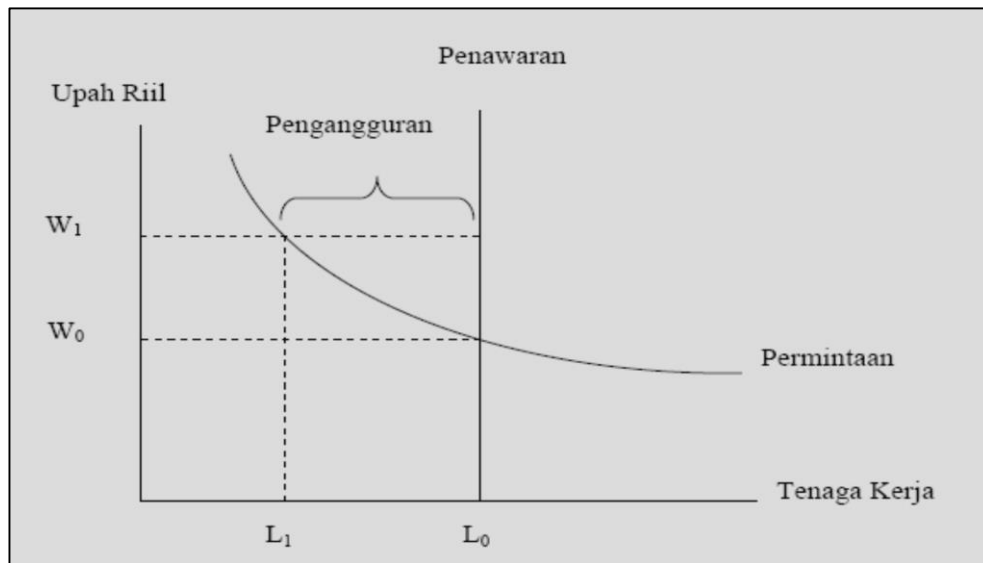
2. Efisiensi Upah

Besarnya upah juga dipengaruhi oleh efisiensi pada teori pengupahan. efisiensi yang terjadi pada fungsi tingkat upah tersebut terjadi karena semakin tinggi perusahaan membayar upah akan semakin keras usaha para pekerja (walaupun akan muncul juga kondisi dimana terjadi *diminishing rate*). Hal ini justru akan memberikan konsekuensi yang buruk jika perusahaan memilih membayar lebih pada tenaga kerja yang memiliki efisiensi lebih tinggi maka justru akan terjadi pengangguran terpaksa akibat dari persaingan yang ketat dalam mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.

3. Kekakuan Upah (*Wage Rigidity*)

Indikasi adanya kekakuan upah (*wage rigidity*) adalah kegagalan upah dalam melakukan penyesuaian penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya. Kekakuan upah merupakan salah satu penyebab terjadinya pengangguran (Mankiw 2003). Secara teoritis, untuk mempertahankan tingkat pengangguran alamiah (*natural rate of unemployment*) sama dengan tingkat aktualnya (*actual rate of*

unemployment), maka harus dijaga agar tingkat upah riil sama dengan *Marginal Productivity to Labor* (MPL). Upah riil menyesuaikan MPL sehingga ketika MPL turun maka upah riil seharusnya juga turun. Tetapi jika tidak terjadi penurunan, maka upah riil tersebut kaku. Semakin lambat mekanisme penyesuaian maka akan semakin lama dan semakin besar efek guncangan negatif terhadap pengangguran, atau pada saat pertumbuhan upah riil lebih tinggi dari pertumbuhan produktivitas perusahaan maka akan menyebabkan penambahan pengangguran. Di sisi lain, kekakuan upah nominal merupakan kemampuan upah nominal dalam melakukan penyesuaian terhadap harga. Semakin lambat mekanisme penyesuaian maka akan semakin besar penurunan upah riil sebagai respon dari inflasi yang tidak diantisipasi. Dalam model keseimbangan pasar tenaga kerja, upah riil berubah untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Tetapi upah tidak selalu fleksibel, sehingga upah riil tertahan di atas tingkat ekuilibrium sehingga terjadi pengangguran.



Sumber : Mankiw (2003)

Gambar 2.1 Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja

Untuk memahami kekakuan upah dan pengangguran struktural, maka penting untuk memahami mengapa pasar tenaga kerja tidak berada pada tingkat keseimbangan penawaran dan permintaan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Gambar 2.1, saat upah riil melebihi tingkat ekuilibrium dan penawaran pekerja melebihi permintaannya, maka perusahaan-perusahaan diharapkan akan menurunkan upah yang akan dibayar kepada para pekerja. Namun pada kenyataannya, hal ini tidak terjadi. Pengangguran struktural kemudian muncul sebagai implikasi karena perusahaan gagal menurunkan upah akibat kelebihan penawaran tenaga kerja (Mankiw 2003).

Kekakuan upah ini terjadi sebagai akibat dari Undang-Undang No, 13 Tahun 2003 tentang UMR atau kekuatan monopoli serikat pekerja. Berbagai faktor tersebut berpotensi menjadikan upah tertahan di atas tingkat upah keseimbangan. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan

pengangguran. Undang-undang ini menetapkan tingkat upah minimal yang harus dibayar perusahaan kepada para karyawannya. Kebijakan upah minimum ditenggarai akan lebih banyak berdampak pada penganggur dengan usia muda (Mankiw 2003). Alasannya yaitu pekerja dengan usia lebih muda termasuk anggota angkatan kerja yang kurang terdidik dan kurang berpengalaman, maka mereka cenderung memiliki produktivitas marginal yang rendah.

Kekakuan upah nominal juga disebabkan oleh adanya indeksasi upah terhadap inflasi. Pada intinya indeksasi adalah upah yang telah disesuaikan dengan kebutuhan hidup, dengan kata lain, upah ini telah disesuaikan dengan inflasi. Ketika terjadi inflasi, pekerja akan menuntut kenaikan upah yang memaksa perusahaan untuk meningkatkan upah, karena adanya biaya yang harus ditanggung (*perceived cost*) dari tindakan pekerja jika tuntutan kenaikan upah tidak dikabulkan perusahaan (misalnya; mogok kerja, demonstrasi).

2.1.1.2 Teori Pengangguran

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang Teori-Teori Pengangguran yaitu:

1. Teori Klasik

Teori Klasik menjelaskan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik, pengangguran terjadi karena mis-

alokasi sumber daya yang bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga (Gilarso, 2004).

Jadi dalam Teori Klasik jika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun dan hal tersebut mengakibatkan produksi perusahaan menjadi turun. Sehingga permintaan tenaga kerja akan terus meningkat karena perusahaan mampu melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari rendahnya biaya tadi. Peningkatan tenaga kerja selanjutnya mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada di pasar, apabila harga relatif stabil (Tobar, 2000).

2. Teori Keynes

Dalam menanggapi masalah pengangguran Teori Keynes mengatakan hal yang berlawanan dengan Teori Klasik, menurut Teori Keynes sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja.

Keynes menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar sektor pariwisata dapat

menciptakan lapangan pekerjaan (Soesastro, dkk, 2005). Perlu dicermati bahwa pemerintah hanya bertugas untuk menjaga tingkat permintaan agregat, sementara penyedia lapangan kerja adalah sektor wisata. Hal ini memiliki tujuan mempertahankan pendapatan masyarakat agar daya beli masyarakat terjaga. Sehingga tidak memperparah resesi serta diharapkan mampu mengatasi pengangguran akibat resesi.

2.1.1.3 Bentuk-Bentuk Pengangguran

Bentuk-Bentuk pengangguran menurut Sumarsono (2009:251) yaitu :

- a. Pengangguran friksional (frictional unemployment) adalah pengangguran yang di sebabkan adanya kesulitan mempertemukan antara pihak yang membutuhkan tenaga kerja dengan pilihan yang memiliki tenaga kerja (angkatan kerja).
- b. Pengangguran stuktural (stuctural unemployment) adalah pengangguran yang di sebabkan oleh penganggur yang sedang mencari pekerjaan yang tidak mampu memenuhi persyaratan yang di tentukan pembuka lapangan kerja.
- c. Pengangguran teknologi (technology unemployment) adalah pengangguran yang di sebabkan perkembangan pergantian teknologi. Perubahan ini dapat menyebabkan pekerja harus di ganti untuk bisa menggunakan teknologi yang di terapkan.
- d. Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja.

- e. Pengangguran setengah menganggur adalah pengangguran di saat pekerja yang hanya berkerja di bawah jam normal (sekitar 7-8 jam per hari).

2.1.1.4 Jenis-Jenis Pengangguran

Jenis-jenis pengangguran khusus di negara sedang berkembang menurut Edward (dalam Todaro, 1999-244-245) yaitu :

- a. Pengangguran terbuka

Pengangguran terbuka yaitu mereka yang benar-benar tidak bekerja baik secara sukarela maupun karena terpaksa.

- b. Setengah pengangguran

Setengah pengangguran yaitu para pekerja yang jumlah jam kerjanya lebih sedikit dari yang sebenarnya mereka inginkan.

- c. Mereka yang tampak aktif bekerja tetapi sebenarnya kurang produktif adalah mereka yang tergolong dalam pengangguran terselubung, namun bekerja di bawah standar produktivitas optimal.

- d. Mereka yang memang tidak mampu bekerja secara penuh karena cacat yang sebenarnya mereka ingin bekerja tetapi mereka berada pada kondisi yang tidak memungkinkan.

- e. Mereka yang kurang produktif

Mereka yang tidak produktif yaitu mereka yang sesungguhnya mempunyai kemampuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan produktif akan tetapi mereka tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menghasilkan *output* karena yang mereka miliki hanyalah tenaga, sehingga meskipun sudah bekerja keras tetap saja hasilnya tidak memadai.

Menurut Edward (dalam arsyad, 2004:288), untuk mengelompokan masing-masing pengangguran perlu di perhatikan dimensi-dimensi sebagai berikut.

- a. Waktu banyak di antara mereka yang ingin bekerja lebih lama, misalnya jam kerjanya per hari, per minggu, per tahun.
- b. Intensitas pekerjaan (yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi makanan).
- c. Produktivitas (kurangnya produktivitas seringkali di sebabkan oleh kurangnya sumber daya komplementer untuk melakukan pekerjaan).

2.1.1.5 Dampak Pengangguran

Dampak dari pengangguran terhadap perekonomian menurut Sumarsono (2006:260), ada dua aspek ekonomi, yaitu:

- a. Dampak pengangguran terhadap Perekonomian suatu Negara

Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Hal itu terjadi karena pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian. Dampak negatif pengangguran terhadap kegiatan perekonomian adalah sebagai berikut:

- 1) Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang di capainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional rill (nyata) yang di

capai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang di capai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.

- 2) Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan ekonomi menurun, sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus di bayar dari masyarakatpun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.
- 3) Pengangguran tidak menggalakan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan investor (pengusaha). Untuk melakukan peluasan atau pendirian usaha industri baru. Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu.
- b. Dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan masyarakat.

Dampak negatif pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan terhadap masyarakat pada umumnya sebagai berikut.

- 1) Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian.
- 2) Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan .

3) Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik.

2.1.2 UMKM

2.1.2.1 Pengertian UMKM

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- b) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta, dan.
- c) Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar. Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah pada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

2.1.2.2 UMKM Menurut Para Ahli

Ada beberapa pengertian UMKM menurut para ahli atau pihak yang langsung berhubungan dengan UMKM, antara lain:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki:
 - a) Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
 - b) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - c) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 26 perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria :

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah

merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

3. Menurut Kementrian Keuangan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan /usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya.

4. Menurut Bank Indonesia (BI)

Bank Indonesia mendefinisikan UKM berdasarkan asetnya. Dimana UKM diartikan sebagai usaha yang asetnya (tidak termasuk tanah dan bangunan), yang bernilai kurang dari 600 juta rupiah.

2.1.2.3 Klasifikasi UMKM

Suatu komite untuk pengembangan ekonomi mengajukan konsep tentang UMKM, dengan lebih menekankan pada kualitas atau mutu daripada kriteria kuantitatif untuk membedakan perusahaan usaha kecil menengah dan besar. Ada empat aspek yang dipergunakan dalam konsep UMKM, yaitu kepemilikan, operasinya terbatas pada lingkungan sekitar atau kumpulan pemodal, wilayah operasinya terbatas pada lingkungan sekitar, meskipun pemasaran dapat melampaui wilayah lokalnya, ukuran dari perusahaan lainnya dalam bidang usaha

yang sama. Ukuran yang dimaksud bisa jumlah pekerjaan atau karyawan atau satua lainnya yang signifikan (Partom dan Soejodono, 2004)

Menurut Rahmana (2009), UMKM dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu:

- 1) *Livelihood activities*, yaitu UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya Pedagang Kaki Lima (PKL)
- 2) *Micro Dynamic Enterprice*, yaitu UMKM yang memiliki pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan
- 3) *Small Dynamic Enterprice*, yaitu UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan sub-kontak dan ekspor.

2.1.2.3 Peran UMKM

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terstruktur dengan arah produktivitas dan daya saing adalah tujuan dan peran UMKM dalam menumbuhkan wirausahawan yang tangguh. Menurut Departemen Koperasi (2008), secara umum UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran sebagai berikut:

- 1) Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi
- 2) Penyedia lapangan kerja terbatas
- 3) Pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat

- 4) Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta kontribusinya terhadap neraca pembayaran.

2.1.3 Tingkat Upah

2.1.3.1. Pengertian Upah Minimum Provinsi

Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi (Sumarsono, 2009:181). Sedangkan menurut Gilarso (2001:211), upah disebut juga tarif balas karya rata-rata yang berlaku umum dalam masyarakat untuk segala macam pekerjaan. Tingkat upah ini dapat di perhitungkan per jam, hari, minggu, bulan, atau tahun.

Upah mempunyai pengertian (Sukirno, 2005:351), yaitu:

- a. Upah uang

Adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi.

- b. Upah rill

Adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.

2.1.3.2. Sistem Upah

Menurut Gilarso (2001:216-217), sistem upah di bagi menjadi:

- a. Upah menurut prestasi (upah potongan)

Upah menurut prestasi adalah besarnya upah tergantung dari banyak sedikitnya hasil yang di capai dalam jangka waktu tertentu. Cara ini

hanya dapat di terapkan kalau hasil kerja bisa di ukur secara kuantitatif (dengan memperhitungkan kecepatan mesin, kualitas bahan yang di pakai).

b. Upah waktu

Upah waktu merupakan besar upah yang di tentukan atas dasar lamanya waktu pekerjaan melakukan pekerjaan bagi majikan. Bisa di hitung per jam, per hari, per minggu atau per bulan. Sistem ini terutama di pakai untuk jenis pekerjaan yang hasilnya sukar di hitung per potong. Cara ini memungkinkan mutu pekerjaan yang baik karena karyawan tidak tergesa-gesa dan administrasi dapat sederhana. Disamping itu perlu pengawasan apakah si pekerja bekerja selama jam kerja.

c. Upah borongan

Upah borongan adalah balas jasa yang di bayar untuk satu pekerjaan yang di borongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali di pakai pada satu pekerjaan yang di selesaikan oleh suatu kelompok kerja. Untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas karya, yang kemudian dibagi-bagi antara para pelaksana. Misalnya untuk pembangunan gedung, pembuatan sumur, dan lain-lain.

d. Upah premi

Upah premi merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi “normal” berdasarkan waktu atau jumlah hasil. Apabila seorang pekerja mencapai prestasi yang lebih

dari itu, pekerja tersebut diberi “premi”. Premi dapat juga diberikan, misalnya untuk penghematan waktu, penghematan bahan, kualitas produk yang baik, dan sebagainya. Dalam perusahaan modern patokan untuk prestasi minimal di tentukan secara ilmiah berdasarkan *Time And motion Study*.

e. Upah bagi hasil

Bagi hasil merupakan cara yang biasa di gunakan di bidang pertanian dan dalam usaha keluarga, tetapi juga di kenal di luar kalangan itu. Misalnya, pekerja atau pelaksana diberi bagian dari keuntungan bersih; direksi sebuah perusahaan mendapat tantieme (bagian keuntungan perusahaan yang di hadiahkan kepada karyawan), bahkan kaum buruh dapat diberi saham dalam perusahaan tempat mereka bekerja sehingga kaum buruh ikut menjadi pemilik perusahaan.

f. Peraturan gaji pegawai negeri

Gaji Pegawai Negeri Sipil (GPNS) berdasarkan dua prinsip : pendidikan dan masa kerja. Setiap yang di angkat sebagai pegawai negeri mendapat gaji pokok yang di tentukan oleh golongan dan masa kerja.

2.1.3.3. Faktor-Faktor yang Menimbulkan Perbedaan Upah

Faktor-faktor penting yang menjadi Sauber dari perbedaan upah di antara pekerja-pekerja di dalam suatu jenis kerja tertentu dan di antara berbagai golongan pekerjaan menurut Sukirno (2005:364-366) adalah :

- a. Perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis pekerjaan.
- b. Perbedaan dalam jenis-jenis pekerjaan.
- c. Perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan.
- d. Terdapatnya pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan.
- e. Ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja.
- f. Faktor geografis.
- g. Faktor institusional.

2.1.3.4 Teori Upah

1. Teori Upah Berdasar Batas Kebutuhan Hidup Minimum Pekerja

Teori upah berdasar kebutuhan hidup minimum pekerja ini merupakan salah satu teori tertua dalam penetapan upah yang dilontarkan oleh Adam Smith. Teori ini mendasarkan falsafahnya pada pandangan bahwa harga suatu kerja “upah” pada hakekatnya adalah pengeluaran kerja. Oleh karena itu upah harus sama dengan harga kebutuhan-kebutuhan hidup pokok pekerja dan orang yang menjadi tanggung jawabnya yang berupa sandang, pangan, dan papan.

Penetapan upah berkaitan dengan jumlah jiwa yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga. Pengikut pendapat ini berpandangan bahwa kenaikan tingkat upah akan berpengaruh pada pertambahan penduduk. Kelebihan upah di atas kebutuhan barang dan jasa akan berakibat bertambahnya jumlah anggota keluarga pekerja. Efek selanjutnya, pertambahan anggota keluarga akan berakibat pada meningkatnya penawaran tenaga kerja sehingga berakibat menurunnya tingkat upah. Penurunan tingkat upah sampai di bawah batas

minimal kebutuhan hidup akan berpengaruh pada tingkat kesehatan, gizi, dan pendidikan keluarga pekerja sehingga layanan jasa yang didapat oleh pekerja akan menurun. Dalam kondisi ini, pekerja terdorong untuk mempersedikit jumlah anggota keluarga yang ditanggung. Akibatnya jumlah anggota keluarga mengecil dan jumlah penawaran tenaga kerja menurun pada masa akan datang. Penurunan penawaran tenaga kerja ini akan berpengaruh pada kenaikan tingkat upah pada masa yang akan datang yang akan berpengaruh pada perbaikan tingkat kesehatan, gizi dan, pendidikan anggota keluarga serta meningkatnya penawaran tenaga kerja, begitu seterusnya.

Teori ini dibantah karena hanya fokus pada sisi penawaran tenaga kerja saja dan tidak memperhatikan sisi permintaan tenaga kerja. Padahal penetapan tingkat upah terkait dengan beberapa unsur, seperti tingkat permintaan tenaga kerja, keahlian pekerja, kreativitas dan produktivitasnya, perlindungan hukum, dan hak pekerja.

1. Teori Upah Substansi

David Ricardo menciptakan teori upah substansi dengan memanfaatkan teori hukum penawaran dan permintaan. Menurut Ricardo, jika upah pekerja suatu waktu cukup tinggi, maka para pekerja akan cenderung melakukan pernikahan karena upahnya cukup untuk menyediakan mas kawin dan pesta perkawinan. Akibatnya tingkat kelahiran meningkat dan selanjutnya berakibat semakin meningkatnya pertumbuhan angkatan kerja yang mencari lapangan pekerjaan. Kondisi

ini akan berlanjut sampai para pencari kerja bersedia diberi upah serendah mungkin ke tingkat substansi. Ketika upah berada di tingkat substansi, para pekerja sedikit melakukan pernikahan dan jumlah kelahiran sedikit yang berakibat menurunnya angkatan kerja. Penurunan angkatan kerja menjadikan upah naik. Demikian terus-menerus upah akan naik dan turun berkisar di atas dan bawah upah substansi.

2. Teori Upah Menurut Pertambahan Produk Marginal

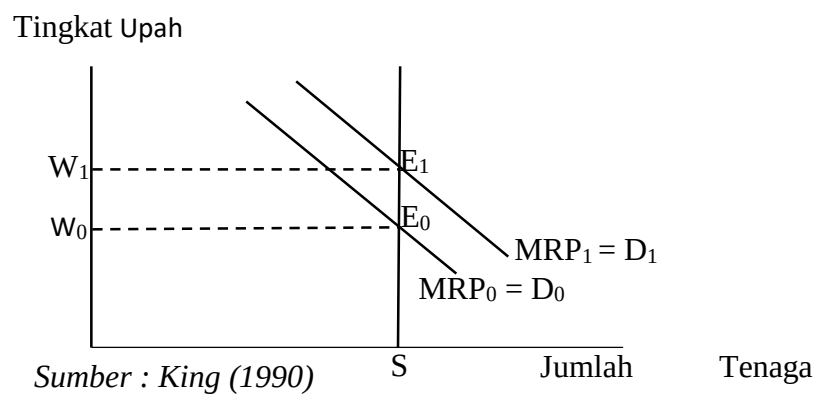
Teori neo klasik mengemukakan bahwa dalam rangka memaksimumkan keuntungan tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut. Pengusaha mempekerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil marginal seseorang sama dengan upah yang diterima orang tersebut. Teori produktifitas marginal menyatakan bahwa biaya produksi tambahan yang dibayarkan kepada faktor produksi itu sama dengan hasil penjualan tambahan yang diperoleh dari produksi tambahan yang diciptakan oleh faktor produksi tersebut.

Dari konsep di atas kemudian dikenal istilah *Marginal Product of labour* (MPL), yaitu tambahan output yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat penambahan input sejumlah satu unit. Dalam pandangan klasik, MPL inilah yang dianggap sama dengan upah riil yang diterima oleh tenaga kerja ($MPL = W/P$). Teori ini didasarkan pada asas nilai

pertambahan hasil marginal faktor produksi, di mana upah merupakan imbalan atas pertambahan nilai produksi yang diterima perusahaan dari karyawan.

Dalam pandangan ilmu ekonomi upah riil sangat tergantung kepada produktifitas dari tenaga kerja. Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan teori permintaan ke atas produksi, sebagaimana grafik berikut:

Gambar 2.2 Penentuan Upah di Pasar Tenaga Kerja



Kurva $MRP_0 = D_0$ dan $MRP_1 = D_1$ menunjukkan hasil penjualan marginal. Kurva MRP menggambarkan kurva permintaan buruh, yang nilainya ditentukan oleh MPP (produksi fisik marginal) dan harga barang. Keadaan kurva MRP_1 berada di atas MRP_0 berarti pada setiap tingkat penggunaan tenaga kerja hasil penjualan marginal yang digambarkan oleh MRP_1 adalah lebih tinggi dari pada hasil penjualan marginal yang digambarkan oleh MRP_0 . Apabila dimisalkan harga barang di dua keadaan itu adalah sama, kedudukan MRP_1 yang lebih tinggi dari MRP_0 mencerminkan perbedaan produktifitas. Jumlah

penawaran tenaga kerja di pasar ditunjukkan oleh kurva S, yang memotong MRP0 di titik E0 dan memotong MRP1 di titik E1. Apabila permintaan tenaga kerja adalah $MRP_0 = D_0$, upah tenaga kerja adalah W_0 , sedang permintaan tenaga kerja adalah $MRP_1 = D_1$ maka tingkat upah adalah W_1 .

2.1.4 Modal

2.1.4.1 Pengertian Modal

Modal memiliki dua fungsi yaitu menopang kegiatan produksi dan menutup dana atau pengeluaran tetap yang tidak berhubungan secara langsung dengan produksi dan penjualan. Semakin tinggi modal yang digunakan akan berpengaruh terhadap jumlah produksi yang dihasilkan untuk produksi akan semakin banyak. Dalam industri kecil cenderung menggunakan tenaga manusia, pada intinya tidak menggunakan teknologi yang canggih. Modal yang berupa uang dan barang yang ada cenderung digunakan untuk membeli bahan mentah untuk memproduksi barang yang diinginkan, sehingga dengan adanya penanaman bahan mentah untuk produksi barang maka akan menambah penggunaan tenaga kerja.

Variabel yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja salah satunya adalah modal. Dalam praktiknya faktor-faktor produksi baik sumber daya manusia maupun sumber daya manusia seperti modal tidak dapat dipisahkan dalam menghasilkan barang atau jasa. Pada suatu industri, dengan asumsi faktor-faktor yang lain tetap, maka semakin besar modal yang ditanamkan akan menambah penggunaan tenaga kerja.

2.1.4.2 Modal Menurut Para Ahli

Meij (dalam Riyanto, 2010:18) mengartikan modal sebagai “keloktifitas” dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debit, sedangkan yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang-barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dan fungsi produktifnya untuk membentuk pendapatan.

Polak (dalam Riyanto, 2010:18) mengartikan modal adalah sebagai suatu kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal. Dengan demikian modal adalah yang terdapat dalam neraca sebelah kredit. Adapun yang dimaksud dengan barang barang modal adalah barang-barang yang ada dalam perusahaan yang belum digunakan. Jadi yang terdapat dalam neraca sebelah debit.

Bakker dalam buku yang sama mengartikan modal adalah baik yang berupa barang-barang konkrit yang masih ada di dalam rumah tangga perusahaan yang terdapat di neraca sebelah debit. Maupun berupa daya beli atau nilai tukar dari barang-barang itu yang tercatat di sebelah kredit. Adapun menurut Naiggolan, (2004:3) yaitu modal merupakan kelompok yang berisi dari pemilik terhadap perusahaan. Selain itu menurut (Atmaja, 2008:155) mengemukakan modal ialah dana yang digunakan untuk membaca pengadaan aktiva dan koperasi perusahaan.

Pengertian modal menurut Munawir (2006:19) adalah hak atau bagian Modal adalah kekayaan perusahaan yang terdiri atas kekayaan yang disetor atau yang berasal dari luar perusahaan dan kekayaan itu hasil aktivitas usaha itu sendiri.

Apabila kita melihat neraca suatu perusahaan, ada modal konkrit dan modal abstrak yang juga menggambarkan modal yaitu neraca dari suatu pihak menunjukkan modal menurut bentuknya (sebelah debit) dilain pihak menggambarkan sumbernya (sebelah kredit).

Dari beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa modal adalah yang tertera disebelah debit neraca. Menggambarkan bentuk-bentuk penanaman dana yang diperoleh. Sedangkan ditinjau dari sumbernya maka modal adalah yang tertera disebelah kiri kredit. Menggambarkan dari pada dana itu sendiri.

2.1.4.3 Klasifikasi Modal

Menurut Bambang Riyanto, klasifikasi modal digolongkan menjadi 2 bagian yaitu:

Modal menurut bentuknya (modal aktif) yaitu modal yang tertera di sebelah debit dari neraca, yang menggambarkan bentuk-bentuk dimana seluruh dana yang diperoleh perusahaan ditanamkan.

1. Modal aktif yang berdasarkan cara dan lamanya perputaran dapat di bedakan menjadi 2 yaitu :
 - a. Aktiva lancar yaitu aktiva yang habis dalam satu kali perputaran dalam proses produksi dan proses perputarannya adalah jangka waktu yang pendek (umumnya kurang dari 1 tahun).
 - b. Aktiva tetap yaitu aktiva yang tahan lama yang tidak atau yang secara berangsur-angsur habis turut serta dalam proses produksi perputarannya dalam jangka waktu yang panjang (umumnya lebih dari 1 tahun).

2. Modal aktif berdasarkan fungsi bekerjanya aktiva dalam perusahaan dibedakan menjadi 2 yaitu :
 - a. Modal kerja (*Working Kapital*) adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar (*Gross Working Kapital*) atau kelebihan dari aktiva lancar diatas hutang lancar.
 - b. Modal tetap (*Financial Kapital Assets*) adalah pembiayaan yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu yang tetap dari aktiva lancar dalam jangka waktu tertentu.
 - c. Modal menurut sumber atau asalnya (modal pasif) yaitu modal yang tertera disebelah kredit dari neraca yang menggambarkan sumber-sumber dari mana dana tersebut diperoleh. Modal pasif berdasarkan asalnya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :
 - a) Modal sendiri adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri (cadangan, laba) atau berasal dari pengambilan bagian, peserta atau pemilik (modal saham, modal peserta, dll).
 - b) Modal asing (modal kreditur/hutang) adalah modal yang berasal dari kreditur, yang ini merupakan hutang bagi perusahaan yang bersangkutan.

2.1.4.5. Sumber Modal

Masalah modal dalam suatu perusahaan merupakan persoalan yang tidak akan berakhir, mengingat bahwa pentingnya masalah modal yang nantinya akan digunakan dalam segala aktivitas perusahaan itu sendiri. Perusahaan dapat memperoleh sumber modal dengan cara-cara berbeda antara satu perusahaan

dengan perusahaan lainya. Menurut Bambang Riyanto sumber modal dapat di bedakan menjadi 2 yaitu :

1. Sumber *intern (Internal Sources)* modal atau dana yang dibentuk atau di hasilkan sendiri di dalam perusahaan yang berupa laba ditahan (*Retained Earning*) dan akumulasi penyusutan (*Accumulated Depreciation*).
2. Sumber *ektern (External Sources)* sumber modal berasal dari luar perusahaan dapat berasal dari kreditur dan pemilik, peserta atau pengambilan bagian dari perusahaan. Modal yang berasal dari kreditur adalah merupakan hutang bagi perusahaan yang bersangkutan dan disebut sebagian modal asing, sedangkan dana atau modal yang berasal dari pemilik, peserta atau pengambilan bagian dalam perusahaan adalah dana yang akan di tanamkan di dalam perusahaan adalah dana yang akan ditanamkan di dalam perusahaan yang bersangkutan dan dikenal sebagai modal sendiri.

Ditinjau dari cara terjadinya sumber modal terbagi menjadi 3 yaitu :

1. Tabungan Dari Subyek-Subyek Ekonomi.

Tabungan adalah pendapatan yang tidak di konsumsi. Tabungan dapat digunakan untuk investasi, tabungan yang di gunakan untuk kepentingan konsumsi tidak dapat memperbesar modal, sedangkan tabungan yang di gunakan untuk keperluan investasi dapat memperbesar modal.

2. Penciptaan Atau Kreasi Uang/Kredit Oleh Bank.

Sebagai sumber kedua yaitu penciptaan atau kreasi uang yang dapat menciptakan uang tidak hanya bank sirkulasi tetapi juga bank-bank dari pada penggunaan uang.

3. Identifikasi Dari Pada Penggunaan Uang.

Cara ini dilakukan oleh bank dengan meminjamkan kembali uang yang dipercayakan atau disimpan oleh masyarakat di bank.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa pengertian mengenai pengangguran sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian tersebut sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian/Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	M. Taufik Zamrowi (2007) “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil (Studi Kasus Industri Kecil Mebel di Kota Semarang)”	Variabel Independen: Tingkat Upah dan Modal	Variabel Independen : Produktivitas Tenaga Kerja	Variabel upah, produktivitas dan non upah sentra berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja. Variabel modal

				berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja. Secara simultan atau bersama-sama variabel non upah, modal, tingkat upah atau gaji dan produktivitas mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan. Variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada industri kecil mebel di kota Semarang adalah variabel modal
2	Reza Adi Purnomo	Variabel	Variabel	Variabel upah

	(2013) “analisis variabel-variabel yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada usaha kecil dan menengah anyaman bambu di Kabupaten Banyuwangi”	Independen : Upah dan Modal	Independen : Omset	berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan atau penyerapan tenaga kerja. Variabel tingkat upah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan. Variabel modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap permintaan tenaga kerja. Variabel omset penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja
3	Ni Made Santri	Variabel	Variabel	Variabel modal

	Widiastuti (2014) “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus UKM Kerajinan di Kabupaten Gianyar)”	Independen : Upah dan Modal Usaha Nilai Produksi	Independen : Lama Usaha	yang dikeluarkan oleh pengusaha UKM Kerajinan di Kabupaten Gianyar berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Gianyar. Variabel upah berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor UKM Kerajinan di Kabupaten Gianyar. Variabel nilai produksi berpengaruh
--	---	---	----------------------------	--

				signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor UKM Kerajinan di Kabupaten Gianyar. Variabel lama usaha berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor UKM Kerajinan di Kabupaten Gianyar
4	Ayu Wafi Lestari (2011) “Pengaruh jumlah usaha, nilai investasi, dan upah minimum terhadap permintaan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah di Kabupaten	Variabel Independen : Upah Minimum	Variabel Independen : Jumlah Usaha dan Investasi	Diduga ada pengaruh positif dan signifikan dari jumlah unit usaha terhadap permintaan tenaga kerja pada sektor industri kecil

	Semarang”			dan menengah di Kabupaten Semarang. Diduga ada pengaruh negatif dan signifikan dari tingkat upah minimum Kabupaten terhadap permintaan tenaga kerja pada sektor industri kecil dan menengah di Kabupaten Semarang
5	Achma Hendra Setiawan (2010) “analisis penyerapan tenaga kerja pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM) di Kota Semarang”	Variabel Independen: Jumlah Unit Usaha dan Upah Minimum	Variabel Independen : Investasi dan Nilai Output	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jumlah unit usaha, nilai, investasi nilai output dan upah minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja.

				Jumlah unit usaha, nilai investasi, dan upah
6	M. Wardiansyah, Yulmardi, Zainul Bahri/2016/Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran (Studi Kasus provinsi-provinsi se-Sumatera)	Variabel Independen : Upah Minimum	Variabel Independen : Pertumbuhan Ekonomi	Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran
7	Nina Cahyani (2016) “Pengaruh Jumlah Pengangguran, Pertumbuhan ekonomi, Upah Minimum Regional, Inflasi dan Investasi terhadap Jumlah Pengangguran di DIY Tahun 1986-2015”	Variabel Independen : Upah Minimum Regional	Variabel Independen : Jumlah Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Investasi	Penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap jumlah pengangguran, upah minimum regional berpengaruh positif terhadap jumlah pengangguran,

				inflasi berpengaruh positif terhadap jumlah pengangguran, dan investasi berpengaruh negatif terhadap jumlah pengangguran .
8	Haryani Siburian (2013). “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Dan Menengah Study Kasus Pada Industri Kecil Dan Menengah Furniture Kayu Di Kabupaten Jepara”	Variabel Independen: Modal, dan Upah	Variabel Independen : Produktifitas dan Usia Usaha	variabel modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, produktifitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan

				tenaga kerja, sedangkan usia usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan keseluruhan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja
9	Divianto (2014) ”Pengaruh Upah, Modal, Produktifitas Dan Teknologi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Kecil Dan Menengah Di Kota Palembang”	Variabel Independen: Upah dan Modal	Variabel Independen : Produktifitas dan Teknologi	Dari hasil penelitian bahwa upah tidak berpengaruh dan signifikan terhadap tenaga kerja, produktifitas tidak berpengaruh

				dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, modal berpengaruh dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, dan variabel investasi teknologi tidak berpengaruh dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
10	Vera Haryani Siburian (2013) “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Dan Menengah Study Kasus Pada Industri Kecil Dan Menengah Furniture Kayu Di Kab. Jepara”	Variabel Independen :Modal dan Upah	Variabel Independen : Produktifitas dan Usia Usaha	hasil penelitian tersebut menunjukkan variabel modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, produktifitas berpengaruh

				positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan usia usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan keseluruhan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
--	--	--	--	---

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan UMKM Terhadap Tingkat Pengangguran

UMKM merupakan usaha kecil yang membantu perekonomian Indonesia disebabkan karena dengan melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru serta juga meningkatkan devisa negara dengan melalui pajak badan usaha (Rudjito, 2003). UMKM merupakan pilar dalam perekonomian Indonesia. UMKM yang bertambah banyak dapat menambah lapangan pekerjaan. Hal ini dikarenakan UMKM lebih banyak menyerap tenaga kerja. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan dengan menyerap tenaga kerja. Dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap maka pengangguran pun dapat berkurang. Sehingga hubungan antara UMKM terhadap pengangguran adalah hubungannya negatif.

2.3.2 Hubungan Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh atau pekerja untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh pekerja. Upah dapat dipandang dari dua sisi yang berbeda. Dari sisi pengusaha atau produsen, upah merupakan biaya yang harus dikeluarkan sehingga ikut menentukan tinggi rendahnya biaya total. Dari sisi

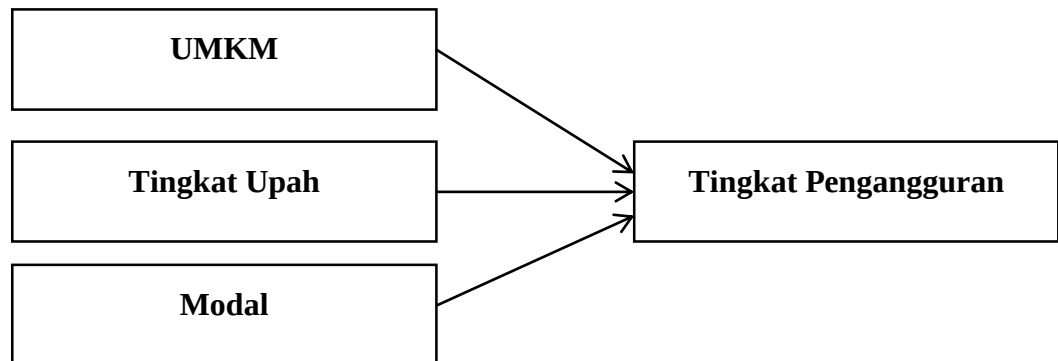
pekerja, upah merupakan pendapatan yang harus diperoleh dari hasil menyumbangkan tenaganya kepada pengusaha atau produsen (Sudarsono, 1996).

Upah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Masyarakat lebih memilih menganggur atau mencari pekerjaan yang lain apabila tingkat upah kecil sebaliknya apabila tingkat upahnya tinggi maka masyarakat akan bersedia untuk bekerja. Bukan berarti lapangan pekerjaan tidak ada, tetapi masyarakat melihat tingkat upah yang akan didapatkan apabila masyarakat bekerja di suatu perusahaan tersebut.

2.3.3 Hubungan Modal Terhadap Tingkat Pengangguran

Modal di sini adalah modal yang berikan oleh bank terhadap pelaku UMKM. Adanya modal ini maka diharapkan dapat menambah jumlah unit dan juga akan mengembangkan dari UMKM itu sendiri. Karena semakin tinggi modal yang digunakan akan berpengaruh terhadap jumlah produksi yang dihasilkan untuk produksi semakin banyak. Jumlah produksi yang banyak memerlukan banyak tenaga kerja dalam proses produksinya, sehingga lapangan pekerjaan bertambah. Bertambahnya lapangan pekerjaan akan mengurangi tingkat pengangguran. Sehingga semakin banyak modal untuk produksi maka memerlukan tenaga kerja yang banyak pula, sehingga pengangguran berkurang (Woyanti, 2011). Sehingga hubungan antara modal terhadap tingkat pengangguran adalah negatif.

Gambar 2.3 Model Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

1. Diduga secara parsial UMKM, tingkat upah dan modal berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2005-2017.
2. Diduga secara bersama-sama UMKM, tingkat upah dan modal berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2005-2017.